



Pemkot Yogyakarta Tata Malioboro Secara Inklusif

YOGYA (KR) - Pengelolaan kawasan Malioboro di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian dari upaya kolektif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan Kraton Yogyakarta.

Penataan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas sekaligus melestarikan kawasan cagar budaya di jalur Sumbu Filosofis yang ditarik dari kawasan Tugu Yogyakarta, Malioboro, Kraton Yogyakarta, sampai Panggung Krapyak/Kandang Menjangan di Krapyak.

Hal ini sesuai dengan harapan Sri Sultan HB X selaku Gubernur DIY yang menginginkan agar Sumbu Filosofis bisa tercatat sebagai Situs Warisan Dunia atau World Heritage di

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), sebuah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Proses menjadikan

Sumbu Filosofis sebagai Cagar Budaya Warisan Dunia harus bersifat inklusif dan terbuka dalam menjangkau aspirasi dari banyak pihak," ujar Hangga Fathana, Dosen Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Islam Indonesia (Prodi HI UII) Yogyakarta, dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Sinergi Pemangku Kebijakan Menuju Pengelolaan Malioboro yang Inklusif' yang diselenggarakan belum lama

ini oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Pengelolaan di kawasan Malioboro mengulirkan kebijakan relokasi pedagang kakilima (PKL). Ada dua lokasi yang disiapkan menjadi tempat relokasi para PKL Malioboro, yaitu di eks Gedung Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra.

Menurut Hangga, pemindahan ini telah memenuhi indikator inklusivitas Bank Dunia yang harus mengedepankan tiga aspek dalam konteks

*** Bersambung hal 7 kol 1**



FGD bertema 'Sinergi Pemangku Kebijakan Menuju Pengelolaan Malioboro yang Inklusif' diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Pemkot

penataan masyarakat inklusif yaitu adanya pasar (markets), ruang (spaces), dan layanan (services) pascarelokasi.

"Kebijakan pengelolaan Malioboro sudah menyediakan pasar (markets) bagi PKL, memberikan ruang gerak sosial kultural dan ekonomi (spaces) bagi para PKL, dan layanan (services) kepada semua pemangku kepentingan yang ada," ungkapnya, saat ditemui Rabu (15/12).

Hangga menuturkan, relokasi PKL Malioboro akan berdampak positif karena menciptakan keseimbangan dan mengakomodasi seluruh pe-

mangku kepentingan. Pemangku kepentingan selama ini sebatas diartikan pedagang kakilima, pengguna pedestrian, dan pemilik toko. Namun, pemangku kepentingan di Malioboro sebetulnya adalah seluruh masyarakat di DIY itu sendiri. "Setelah aspek pasar dan ruang terpenuhi, Pemkot Yogyakarta juga perlu tetap melanjutkan ketersediaan layanan akses dengan memastikan arus pengunjung Malioboro melewati para PKL di lokasinya yang baru nanti," urainya.

Hangga menyampaikan, pengelolaan Malioboro perlu dilihat dari perspektif lebih luas dan prospek jauh ke

depan bagi kawasan ini. Pengelolaan Malioboro sebagai bagian dari kawasan Cagar Budaya Kraton harus tetap bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku dan pemangku kepentingan.

Relokasi PKL Malioboro, kata Hangga, juga akan berdampak positif kepada status PKL. Jika sebelumnya merupakan pelaku ekonomi informal, maka pascarelokasi status PKL akan menjadi pelaku ekonomi formal.

"Tidak dipungkiri, proses perubahan apa pun dan di negara mana pun memang memerlukan penyesuaian. Kekhawatiran oleh sebagian pihak

terhadap dampak perubahan bisa dipahami, namun sejauh kebijakan perubahan dinitiatkan untuk kepentingan masyarakat luas, maka tidak ada lagi alasan untuk menjadi resisten," imbuhnya.

Hangga yakin, sejauh ini Pemkot Yogyakarta mampu berkomitmen terhadap penataan yang inklusif dan konsisten dengan pelayanannya terhadap masyarakat.

"Sehingga penataan Malioboro ke depan akan membawa kawasan itu ke arah yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak," ucapnya. (*)-f

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005